

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Bandung, terletak dikoordinat 107° BT dan $6^{\circ} 55'$ LS. Luas kota Bandung adalah 16.767 Hektare. Kota ini secara goeografis terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, dengan demikian sebagai ibu kota provinsi, Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Dan Bandung kota berhawa sejuk dengan suhu rata-rata 25° C yang merupakan kota metropolitan baru. Karena iklimnya yang sejuk dan topografinya yang unik maka Bandung dijadikan kota wisata oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Kota yang semula dirancang hanya untuk 200.000 penduduk itu kini sudah dihuni oleh lebih dari 2 (dua) juta jiwa karena ada arus pendatang dari wilayah seputar Bandung. Secara Topografis Bandung merupakan cekungan yang terbentuk dari Danau purba Bandung. Cekungan Bandung yang luasnya 2.283 Km² itu terdiri dari dua wilayah administratif yaitu Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Berkembangnya jumlah penduduk dan tingginya arus urbanisasi ke kota ini menyebabkan tingginya kepadatan penduduk yang mencapai 10.899 jiwa per Km² dan selaras dengan itu diikuti pula peningkatan permintaan perumahan dengan sarana penunjang diantaranya air minum dan air limbah.

Pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1985 untuk meningkatkan debit air, mulai dilaksanakan fisik Pengembangan Air Minum Tahap I atau BAWS I, dengan membuat Sumur Artesis sepanjang jalan kereta api. Tahun 1985 sampai dengan 1991 membangun Mini Plant Cibeureum dengan air bakunya dari Sungai Cibeureum, Mini Plant Pakar, air bakunya dari Sungai Cikapundung dan membangun Intake Siliwangi serta pembangunan saluran air kotor sepanjang 176,30 km.

Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, maka masalah-masalah sanitasi lingkungan merupakan masalah yang cukup penting untuk diperhatikan, diantaranya masalah pembuangan air kotor.

Pada tahun 1978 – 1979 Pemerintah Kota Bandung melaksanakan studi “Bandung Urban Development and Sanitary” yang mengusulkan strategi penanganan pengembangan Divisi Air Kotor Kota Bandung.

Pada tahun 1979 – 1994 Pemerintah Kota Bandung melalui ” Bandung Urban Development Project (BUDP)” tahap I dan II memperoleh bantuan dana dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan penyertaan modal dari Pemerintah untuk membangun sarana air limbah dan Instalasi Pengolahan Pengolahan Air Limbah.

Sarana air limbah yang dibangun berupa jaringan perpipaan air limbah yang berada di daerah berpenduduk padat yaitu Bandung Barat, Bandung Timur dan Bandung Tengah-Selatan, sedangkan Instalasi Pengolahan Air Kotor dibangun di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

1) Visi & Misi Perusahaan

VISI :

Visi PDAM Tirtawening Kota Bandung adalah *“Menjadi Perusahaan Daerah Yang Handal dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2021”*

MISI :

- Meningkatkan pelayanan dan inovatif dan berteknologi.
- Meningkatkan nilai tambah melalui pemanfaatan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan.

- Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan , masyarakat dan swasta untuk pengembangan perusahaan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kepedulian terhadap pelanggan dan masyarakat.

2) Maksud & Tujuan Pendirian Perusahaan

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009

PDAM Tirtawening Kota Bandung didirikan dengan maksud dan tujuan :

- 1) Menyelenggarakan usaha pengelolaan air minum dan air limbah bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta usaha lainnya di bidang air minum dan air limbah.
- 2) Memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang air minum dan air limbah dalam rangka menunjang pembangunan dengan menetapkan prinsip perusahaan.

3) Tugas & Fungsi PDAM

Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sesuai Peraturan Walikota Bandung Nomor 236 Tahun 2009 adalah bergerak di bidang pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air limbah di daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, PDAM menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

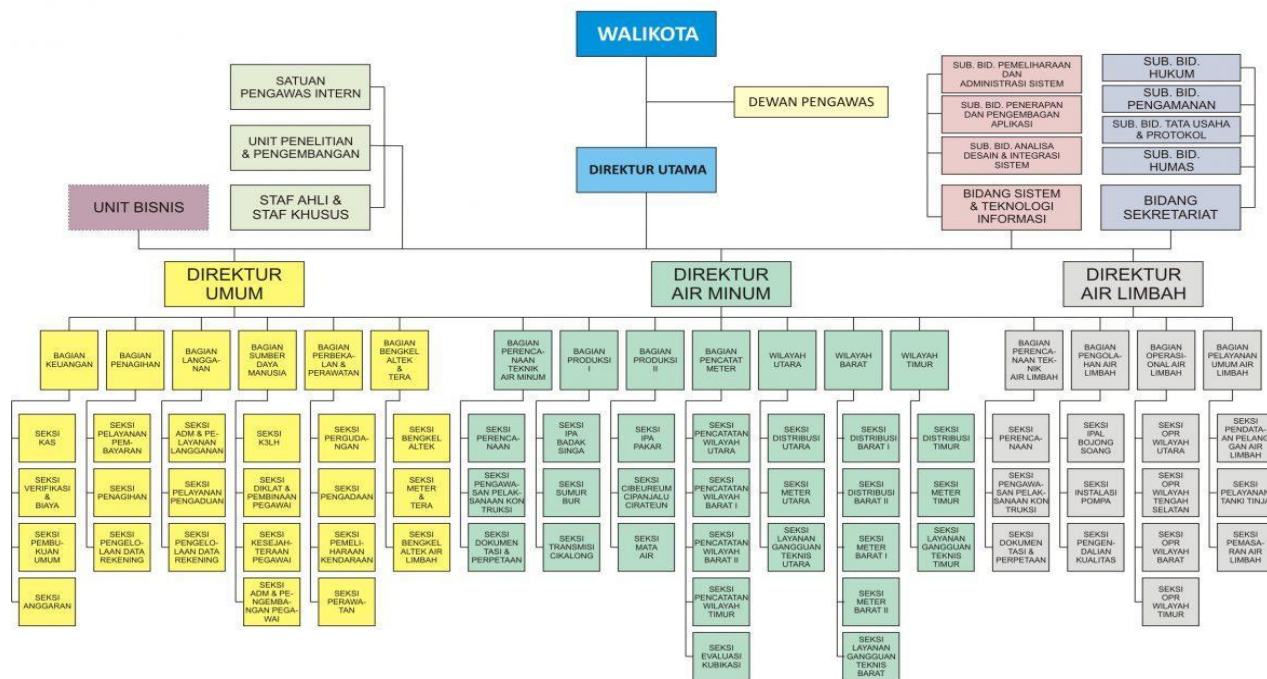
1. Perumusan kebijakan dan strategi usaha pengelolaan air minum dan sarana air limbah ;

2. Melaksanakan pelayanan umum/jasa kepada masyarakat konsumen dalam penyediaan air minum dan sarana air limbah ;
3. Perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana air minum dan air limbah ;
4. Pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah untuk membiayai kelangsungan hidup Perusahaan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
5. Pengelolaan pegawai PDAM ;
6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan usaha PDAM kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

2.2.Struktur Organisasi PDAM TIRTAWENING

PDAM Tirtawening Terbagi Menjadi Kantor Pusat serta beberapa unit kantor pembantu. Kantor utama atau kantor pusat beralamat di Jl. Badak Singa No.10, Lb.Siliwangi, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sedangkan kantor yang menjadi tempat kerja praktik penulis adalah kantor unit bisnis yang merupakan kantor cabang pembantu.

Untuk kantor pusat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

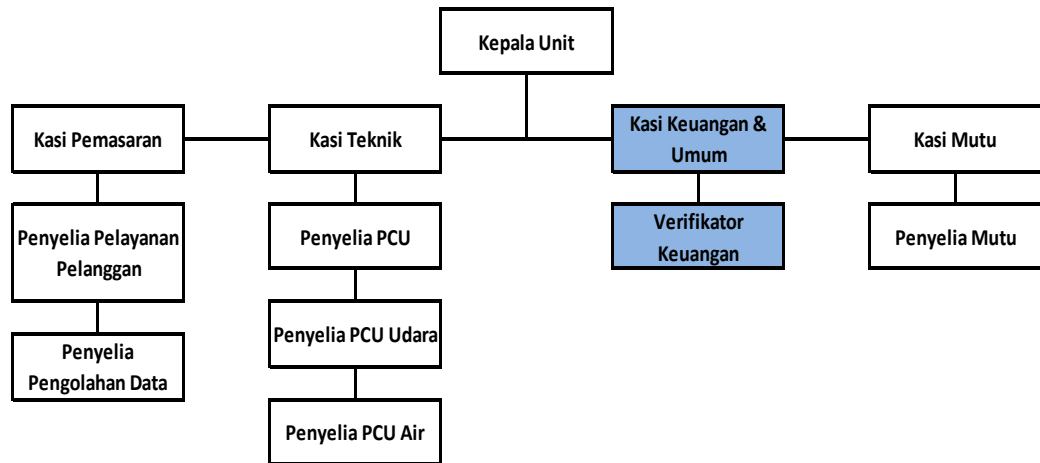


Sumber : Webside resmi PDAM Tirtawening (<https://pamdbg.co.id>)

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PDAM Tirtawening

Pada Unit Bisnis di PDAM Tirtawening sendiri penulis ditempatkan pada Bagian Keuangan yang bertugas membantu pegawai bagian perivikasi keuangan pada unit tersebut. Unit Bisnis PDAM Tirtawening memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Unit Bisnis LPKL PDAM Tirtawening



Sumber : Unit Keuangan & Umum LPKL PDAM Tirtawening

Gambar 2.2

Struktur Organisasi LPKL PDAM Tirtawening

2.3.Deskripsi Jabatan

1. Kepala Unit

Merupakan pimpinan di LPKL PDAM Tirtawening yang bertugas mengatur semua kegiatan LPKL.

2. Kasi Pemasaran

Bertugas sebagai penanggung jawab di bagian pemasaran, yang mana pada bagian ini dilakukan berbagai kegiatan pemasaran perusahaan.

3. Kasi Tehnik

Bertugas sebagai penanggung jawab pada bagian tehnik, yang mana bagian ini merupakan bagian yang akan menyediakan serta memfasilitasi alat untuk segala kebutuhan perusahaan.

4. Kasi Keuangan & Umum

Bertugas sebagai penanggung jawab di bagian keuangan & umum, yang mana bagian ini adalah bagian yang bertugas untuk mencatat transaksi keuangan serta mengatur keuangan perusahaan.

5. Kasi Mutu

Bertugas sebagai penanggung jawab di bagian mutu, yang mana bagian ini merupakan salah bagian penting pada LPKL dikarenakan pada bagian ini dilakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga mutu pelayanan dari perusahaan.

2.4.Aspek Kegiatan Perusahaan

Lingkup pekerjaan yang disediakan oleh LPKL dimulai dari jasa konsultasi terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan monitoring kualitas air dan udara serta audit kesehatan lingkungan sampai dengan konsultasi terhadap hasil uji yang didapat maupun solusi dalam perbaikannya, baik untuk pekerjaan perorangan, swasta, BUMN/BUMD maupun Pemerintah.

Ruang Lingkup Pekerjaan :

1) Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan dilaksanakan guna memberikan masukan kepada pelanggan atau pemilik proyek apakah kegiatan monitoring kualitas lingkungan maupun audit kesehatan lingkungan yang direncanakan layak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti:

- Peraturan pemerintah yang berlaku dibandingkan dengan sasaran kegiatan monitoring itu sendiri,
- Tujuan dari kegiatan Monitoring,
- Kondisi yang diharapkan oleh pelanggan.

Selain dari hal – hal tersebut diatas, kegiatan survey pendahuluan juga dapat memberikan masukan mengenai hal yang perlu dipersiapkan dilokasi kegiatan sebelum pelaksanaan monitoring, sehingga kegiatan monitoring yang dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan.

2) Perencanaan Monitoring Dan Audit

Perencanaan Monitoring Kualitas Lingkungan dan audit kesehatan lingkungan disusun berdasarkan kondisi aktual dilapangan dengan melihat peraturan pemerintah yang berlaku, tujuan dan sasaran monitoring, serta kondisi yang diharapkan pelanggan sehingga dapat ditentukan jumlah contoh uji yang harus diambil, jenis contoh uji yang diambil, parameter uji yang harus diperiksa pada masing – masing contoh uji dan lamanya maupun frekuensi sampling yang harus dilakukan. Dari kegiatan perencanaan monitoring kualitas lingkungan tersebut, LPKL dapat memberikan estimasi biaya yang dibutuhkan, jumlah personil yang terlibat dan waktu pelaksanaan sampling.

3) Pengambilan Contoh Uji (Sampling)

Pelaksanaan Pengambilan Contoh Uji atau sampling harus ditangani oleh petugas khusus yang telah mempunyai sertifikat sebagai pengambil contoh uji (PPC) sesuai peraturan yang berlaku sehingga jika pelanggan tidak memiliki personil pengambil contoh uji tersebut, maka LPKL menyediakan personil pengambil contoh uji sekaligus dilengkapi dengan peralatan dan bahan kimia penunjang, sehingga contoh uji tidak terkontaminasi maupun mengalami perubahan selama proses sampling dan transportasi dari lokasi sampling sampai dengan laboratorium.

4) Pengujian Contoh Uji

Pelaksanaan pengujian baik di lapangan maupun di laboratorium terhadap contoh uji yang telah ditetapkan menggunakan peralatan instrumentasi dan metode uji yang berlaku secara Nasional maupun Internasional seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Standard Method, US.EPA dan lain sebagainya, sehingga hasil pengujian memberikan tingkat akurasi yang tinggi.

5) Konsultasi Hasil Pengujian

Hasil pengujian dari contoh uji disusun dalam sertifikat hasil uji dengan mencantumkan nilai ambang batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas dasar permintaan pelanggan, sehingga nilai hasil uji yang diperoleh dapat dibandingkan langsung dengan nilai ambang batasnya. Jika beberapa atau semua parameter uji yang diukur pada sebuah contoh uji tidak memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan, maka LPKL dapat membantu memberikan penjelasan terhadap beberapa kemungkinan dari terjadinya hal tersebut sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut.

6) Konsultasi Perbaikan Hasil Uji

Berkenaan dengan hasil uji dari contoh uji yang belum atau tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah atau tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan pelanggan, LPKL menyediakan jasa konsultasi untuk menangani permasalahan tersebut diatas, sehingga dapat diperoleh beberapa alternatif cara yang dapat ditempuh pelanggan sehingga dapat memperbaiki kondisi tersebut diatas.

7) Penelitian Dan Evaluasi

Dalam hal ini LPKL memberikan pelayanan yang ditawarkan berupa pengujian dan evaluasi terhadap kualitas air produksi (air bersih) atau kualitas air buangan (limbah) sehingga LPKL dapat memberikan masukan berupa perencanaan disain proses baru maupun perbaikan terhadap disain proses yang sudah ada berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang telah dilaksanakan berikut dengan estimasi pembiayaannya.

8) Pelatihan

Berkaitan dengan bentuk pengabdianya kepada masyarakat, LPKL juga bersedia memberikan pelatihan singkat bagi operator dan pihak – pihak yang akan menangani dan melaksanakan kegiatan monitoring terbatas dilingkungannya, sehingga kegiatan monitoring yang dilaksanakan harian dapat dilaksanakan secara mandiri. Adapun kegiatan monitoring terbatas meliputi pengambilan contoh uji dan pengujian contoh uji untuk parameter yang harus di uji dilapangan.